

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kesejahteraan merupakan salah satu hal yang sangat dicita-citakan oleh masyarakat di dunia, khususnya di Negara Indonesia. Kesejahteraan masyarakat pada dasarnya akan mendukung terwujudnya kehidupan manusia yang inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai kebahagiaan di masa depan serta sebagai tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Todaro dan Smith berpendapat yang dimaksud dengan kesejahteraan masyarakat adalah:

“Kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik meliputi: pertama, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan; kedua, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai - nilai kemanusiaan; dan ketiga, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu.”¹

Chapra menggambarkan secara erat tentang kesejahteraan masyarakat dalam pandangan Islam dimaknai sebagai *falah* bertujuan untuk merealisasikan kehidupan yang baik guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*).²

Al-Ghazali berpendapat dalam kitabnya *Al- Mustashfa Min ‘ilmi Al - Usul*:

“Tercapainya kemaslahatan sendiri merupakan tujuan *syara* dari *Maqasid al-Shari’ah* yang meliputi: *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs*, (menjaga jiwa), *hifz al-aql* (menjaga akal), *hifz an-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-maal* (menjaga harta). Manusia tidak akan merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin, melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan rohani dan materi.”³

¹ Michael P Todaro dan Stephen C Smith. *Economic Development Eleventh Edition* (United States : Addison Wesley, 2011), 22.

² Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 102.

³ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min ‘ilmi Al-Usul*, Jil 1 (Beirut : Dar Al-Watin, 1997), 417.

Kemiskinan sering dikaitkan dengan tolak ukur kesejahteraan masyarakat yang dipandang sebagai problematika yang sangat kompleks dari sudut pandang Islam dan dilarang oleh Allah SWT, karena dengan adanya kemiskinan tersebut akan merubah kesejahteraan hidupnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa, surah ke 4 : 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.”⁴

Pada ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa kegelisahan bagi generasi yang lemah merupakan gambaran dari kemiskinan, yang merupakan antitesis dari kesejahteraan, ayat ini menganjurkan kepada manusia untuk keluar dari kemiskinan sebagai demonstrasi usaha dan berserah diri kepada Allah, sebagaimana hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi “*Sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang melakukan amal perbuatan atau pekerjaan dengan tekun dan sungguh-sungguh (profesional)*”. Allah berpesan kepada manusia untuk memikirkan keturunan mereka dan generasi setelah mereka agar tidak jatuh ke dalam kemiskinan. Hal ini dapat dicapai dengan mempersiapkan atau mendidik generasi berikutnya (keturunan mereka) dengan pendidikan yang berkualitas dan fokus pada kesejahteraan materi dan moral agar mereka kelak menjadi sumber daya manusia yang berbakat dan karismatik.⁵

Masalah umum yang telah terjadi di semua negara terkait dengan kesejahteraan yaitu adanya ketimpangan kemiskinan, terutama di negara - negara berkembang. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh lembaga penelitian Ipsos Global, *What Worries the World* yang dikutip oleh katadata.co.id bahwa salah satunegara berkembang yang memiliki presentase tingkat kemiskinan sangat tinggi

⁴Mundofir Sanusi dkk., *Al-Quran Al-Majid (Al-Quran, Terjemah dan Tajwid Warna)* (Jakarta: PT. Beras, 2014), 78.

⁵ Muhammad Fahrudin Ar-Razi, *Tafsir al-Fakhr ar-Razi asy-Syahrir bi Tafsir al-Kabir Wa Mafatih al-Ghaib* Vol. 9 (Beirut : Dar al-Fikr, 1981), 206.

adalah Indonesia sebesar 44%, Thailand 42%, Hungaria 42% dan Brasil 41%.⁶

Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang banyak yaitu 275,77 juta masih memiliki ketimpangan kemiskinan di beberapa Provinsi pada tahun 2022. Menurut data BPS,⁷ jika tingkat kemiskinan terpusat pada wilayah Jawa. Jawa Barat memiliki jumlah penduduk miskin terbesar kedua sebanyak 4070,98 ribu jiwa setelah Jawa Timur yang tergolong miskin pada tahun 2022.

Jawa Barat terdiri dari empat wilayah yaitu Wilayah I Bogor, Wilayah II Purwakarta, Wilayah III Cirebon dan Wilayah IV Priangan.⁸ Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu kabupaten yang berada di Wilayah IV Priangan dengan presentase penduduk miskin terbesar ke tiga dari tahun 2021 hingga tahun 2022 menurut data Badan Pusat Statistik. Hal Ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1
Presentase Tingkat Kemiskinan Wilayah IV Priangan
Tahun 2018 - 2022

Wilayah	Presentase (%)					Rata-rata
	2018	2019	2020	2021	2022	
Kabupaten Bandung	6,65	5,94	6,91	7,15	6,80	40,81
Kota Bandung	3,57	3,38	3,99	4,37	4,25	23,73
Kota Cimahi	4,94	4,39	5,11	5,35	5,11	30,66
Kabupaten Bandung Barat	10,06	9,38	10,49	11,30	10,82	63,54
Kabupaten Sumedang	9,76	9,05	10,26	10,71	10,14	60,45
Kabupaten Garut	9,27	8,98	9,98	10,65	10,42	60,57
Kabupaten Tasikmalaya	9,85	9,12	10,34	11,15	10,73	62,03
Kota Tasikmalaya	12,71	11,60	12,97	13,13	12,72	77,93
Kabupaten Ciamis	7,22	6,65	7,62	7,97	7,72	45,38
Kota Banjar	5,70	5,50	6,09	7,11	6,73	38,19

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2018- 2022.

⁶Presentase Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial, diakses pada <https://databoks.co.id/datapublish/2023/01/27/kemiskinan-dan-ketimpangan-sosial> (diunduh, 8 Januari 2023).

⁷ www.bps.go.id (diunduh, 10 Januari 2023).

⁸ Luthfi Faishal Azhar, dkk., “ Family Hope Program Evaluation in Poverty Alleviation: Benefit Incidence Analysis ”, *Economics Development Analysis Journal*, 9 no 1, (2020) 97-110, 98.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa presentase penduduk miskin di Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami fluktuasi (naik turun) selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2022, Kabupaten Tasikmalaya telah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,42% sementara angka kemiskinan tersebut masih menempati posisi yang tinggi dari tahun ke tahun. Hal ini dapat di artikan bahwa di kabupaten Tasikmalaya sudah dikatakan berkembang dengan baik, namun angka kemiskinan yang tinggi masih berdampak pada kesejahteraan masyarakat, karena perekonomian yang baik akan mencerminkan penurunan yang terus berlanjut dari tahun ke tahun.

Munculnya ketidaksejahteraan tersebut selain adanya kemiskinan disebabkan karena adanya tingkat pendidikan yang rendah, pendapatan yang tidak stabil, rendahnya kesempatan kerja dan lain-lain. Problematika itu semua harus diberantaskan secara menyeluruh agar tidak terjadi secara terus menerus. Untuk mendapatkan kehidupan sejahtera, selain adanya data kemiskinan diperlukanlah Data Terpadu Kesejahteraan (DTKS) sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021. Data Terpadu Kesejahteraan (DTKS) tersebut diperlukan untuk data pemerlu kesejahteraan sosial, penerimaan sosial dan pemberdayaan sosial.⁹ Berikut adalah jumlah rekapitulasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Tasikmalaya:

Tabel 1.2
Jumlah Rekapitulasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 – 2022

Tahun	Jumlah DTKS	
	Kartu Keluarga	Jiwa
2020	560,746	1.452.490
2021	588,331	1.477.585
2022	564,906	1.465.067

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya, 2020-2022.

⁹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial* (Jakarta:2021), 1-22.

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa dari tahun 2020 hingga 2022 jumlah masyarakat yang telah tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mengalami fluktuatif baik dilihat pada jumlah kartu keluarga ataupun jumlah jiwa. Presentase tertinggi berada pada Tahun 2021 sebesar 588,331 KK dan 1.477.585 Jiwa, sementara pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 564,906 KK dan 1.465.067 jiwa. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa data kesejahteraan dengan data kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya masih memiliki akurasi yang sama pada tahun 2022 yaitu belum sepenuhnya mengalami penurunan yang signifikan.

Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal meningkatkan taraf hidup, pemerintah diharuskan mengambil kebijakan bantuan sosial, bantuan tersebut bisa berupa bentuk uang atau barang. Bantuan sosial ini dapat diartikan sebagai bantuan yang disalurkan oleh pemerintah kepada masyarakat prasejahtera yang merupakan bantuan sementara atau tidak bersifat terus menerus. Bantuan yang diberikan bertujuan agar masyarakat miskin tersebut mampu mencukupi kehidupannya secara seimbang.¹⁰ Dalam hal ini, banyak sekali program bantuan pemerintah yang dikelola oleh Kementerian Sosial bagi masyarakat Kabupaten/Kota yang diberikan kewenangan untuk membagikan bantuan tersebut sebagai tujuan untuk menolong masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

Azhar mengatakan bahwa “Berbagai program yang telah dikeluarkan oleh pemerintah antara lain: Bantuan Sosial Pangan, Bantuan Dana Desa, Bantuan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, Bantuan Jaminan Kesehatan (JKN-KIS), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH) ”.¹¹ Semua bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan sudah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial yang ditindak lanjuti oleh Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.¹²

¹⁰ Kementerian Sosial, *Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Sosial dan Penanganan Kemiskinan* (Jakarta : Kementerian Sosial, 2017).

¹¹ Luthfi Faishal Azhar, dkk., “ Family Hope Program Evaluation in Poverty Alleviation: Benefit Incidence Analysis ”, 99.

¹² Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, *Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan* (Jakarta : TNP2K, 2012), 19.

Dengan dilaksanakannya program bantuan ini, diharapkan agar tepat sasaran untuk dapat mengurangi angka kemiskinan, sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang layak, seperti pada aspek pendidikan, pangan, kesehatan dan sosial untuk dapat melindungi hidupnya.

Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu kabupaten yang memiliki 39 kecamatan, yang masih memiliki problematika terkait masalah kesejahteraan masyarakat. Namun dalam penyaluran bantuan sosial seperti pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sekaligus
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2020-2022

Tahap	2020	2021	2022
Tahap I	87.239 KPM	100.573 KPM	111.290 KPM
Tahap II	91.063 KPM	100.796 KPM	107.135 KPM
Tahap III	101.390 KPM	124.491 KPM	108.233 KPM
Tahap IV	105.538 KPM	124.498 KPM	108.233 KPM

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya, 2020-2022.

Tabel 1.3 diatas dapat disimpulkan bahwa tinggi atau rendahnya kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan pola yang sama dengan jumlah penerima bantuan sosial dikarenakan apabila mengalami penurunan kemiskinan maka jumlah penerima bansos akan berfluktuatif. Perbandingan antara penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2022 mengalami peningkatan dikarenakan masyarakat yang menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) otomatis akan mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), akan tetapi bagi masyarakat yang mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum tentu akan menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan

diberikan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Di mana kriteria dari pemberian bantuan ini memiliki komponen yang berbeda-beda kepada para keluarga penerima manfaat seperti lansia, disabilitas, anak usia dini, ibu hamil yang mempunyai kekurangan energi kronis dan anak sekolah.

Akan tetapi problematika yang terjadi di lapangan pada penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masih terdapat banyak kesenjangan sosial akibat dari data-data keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak terupdate, salah satunya masyarakat ingin tetap menjadi anggota meskipun secara sosial ekonomi telah memenuhi persyaratan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan dengan berbagai alasan yang disalah artikan oleh anggota keluarga penerima manfaat sehingga mereka menggap bahwa ketika bantuan tersebut tidak diterima maka itu sama saja menolak rezeki. Penyaluran bantuan sosial ini dirasa kurang tepat sasaran dalam pelaksanaannya serta belum sempurnanya data dalam menentukan kategori prasejahtera dan sejahtera, sehingga memicu kecemburuan sosial pada masyarakat tergantung apa yang mereka alami. Ketidaktepatan tersebut akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat atau bisa jadi upaya pemerintah untuk melaksanakan kesejahteraan masyarakat tidak berhasil secara maksimal karena salah menetapkan target penyaluran bantuan.

Penelitian dengan judul “Analisis Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Tanah Laut Pada Masa Pandemi Covid-19” yang diteliti oleh Nasrullah dan Annisa menyebutkan bahwa bantuan sosial tidak berpengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.¹³ Akan tetapi bertolak belakang dengan penelitian dengan judul “Pengaruh Zakat, Bantuan Sosial dan Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Diukur Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Gayo Lues)” yang diteliti oleh Santika dan Zulkifli yang menyebutkan

¹³ Muhammad Abdianor Nasrullah dan Rahma Annisa, "Analisis Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Tanah Laut Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Riset Akuntansi Politala* 4, no. 2 (2021): 95-101.

bahwa secara parsial bantuan sosial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kesejahteraan masyarakat.¹⁴

Pendapatan merupakan salah satu indikator dari kesejahteraan masyarakat yang di hitung dalam satuan per kapita. Pendapatan per kapita di suatu daerah dapat diukur dengan melihat Produk Domestik Bruto (PDRB). PDRB tidak dapat menggambarkan secara riil pendapatan yang diterima oleh setiap masyarakat karena masih dipengaruhi oleh komoditas dan jasa.¹⁵

Todaro dan Smith berpendapat bahwa:

“Kesejahteraan masyarakat memiliki hubungan positif dengan pendapatan per kapita, artinya semakin tinggi pendapatan per kapita suatu masyarakat maka akan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Namun kesejahteraan akan berhubungan negatif dengan kemiskinan, semakin tinggi tingkat kemiskinan maka cenderung akan menurunkan kesejahteraan masyarakat.”¹⁶

Hal ini bahwa semakin tinggi pendapatan yang diterima masyarakat maka akan semakin tinggi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebaliknya apabila semakin rendah pendapatan yang diterima oleh masyarakat, maka cenderung lebih rendah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari:

Tabel 1.4
Pendapatan Per kapita Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2018 – 2022

Tahun	PDRB Per kapita (juta rupiah)
2018	34.023.587,07
2019	37.310.226,47
2020	37.443.447,75
2021	39.285.636,36
2022	42.659.502,77

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya, 2018-2022.

¹⁴ Mira Santika dan Zulkifli. "Pengaruh Zakat, Bantuan Sosial dan Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Diukur Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Gayo Lues)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2021).

¹⁵ Maulidah Fadlillah dan Ady Soejoto, "Pengaruh tingkat pendidikan, pendapatan dan konsumsi terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Timur." *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan* 3, no. 2 (2015), 231.

¹⁶ Michael P Todaro dan Stephen C Smith. *Pembangunan Ekonomi, Edisi Kesembilan Bahasa Indonesia, Jilid 1* (Jakarta: Erlangga, 2004), 234.

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa pendapatan per kapita masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2018-2022 telah mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Hal ini menandakan bahwa pendapatan per kapita masyarakat telah mengalami pertumbuhan, akan tetapi peningkatan tersebut masih belum berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya. Pendapatan masyarakat faktanya terdapat masyarakat yang masih memiliki penghasilan yang belum stabil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setelah adanya Covid-19, dikarenakan pekerjaan mereka tidak menentu dan masih mengandalkan pada pekerja seadanya, bahkan tidak sedikit dari mereka masih mengandalkan berhutang untuk menutupi kebutuhannya.

Penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan dan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial PKH Di Desa Bedingin Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan” yang diteliti oleh Haqiqi dan Subroto menyebutkan bahwa secara parsial pendapatan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kesejahteraan keluarga.¹⁷ Namun berbeda dengan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan, Pendidikan dan Gaya Hidup Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Covid-19” yang diteliti oleh Fadhi dan Fahimah yang menyebutkan bahwa pendapatan belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan keluarga penerima manfaat (KPM).¹⁸

Keterkaitan pendapatan dengan kesejahteraan tidak hanya diukur dari sisi finansial saja, tetapi juga berdasarkan fakta bahwa kecukupan pendapatan seseorang dapat mewujudkan kesejahteraan keluarganya.¹⁹ Hal ini masih banyak faktor lain selain pendapatan yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat,

¹⁷ Amin Hafidz Haqiqi dan Waspodo Tjipto Subroto, "Pengaruh Pendapatan Dan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Bedingin Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan." *Jurnal Education and Development* 9, no. 2 (2021): 484-493.

¹⁸ Khotim Fadhli dan Dyah Ayu Noer Fahimah. "Pengaruh Pendapatan, Pendidikan dan Gaya Hidup Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Covid-19." *Jurnal education and development* 9, no. 3 (2021): 118-124.

¹⁹ Hanifa Amanaturrohim dan Joko Widodo, “Pengaruh Pendapatan Dan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Kopi Di Kecamatan Candiroti Kabupaten Temanggung”. *Economic Education Analysis Journal*, 5 no.2, (2016) : 468-479, 476.

karena sejatinya seseorang yang merasa cukup akan mensyukuri apa yang telah dimilikinya.

Faktor lain yang dapat memengaruhi kesejahteraan yaitu tingkat pendidikan. Doshi menyatakan bahwa pendidikan secara langsung akan mengurangi ketimpangan dan kemiskinan, yaitu dengan meningkatkan produktivitas masyarakat dan memperbaiki kesempatan mereka untuk memperoleh pekerjaan dengan upah yang lebih baik.²⁰ Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Deden yang menyatakan bahwa semakin tingginya pendidikan maka akan meningkatkan angka melek huruf dan sadar akan pentingnya mendapatkan pekerjaan yang layak.²¹ Artinya jika seseorang memiliki kualitas pendidikan yang tinggi maka akan menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal, sehingga di masa mendatang mereka akan dapat hidup lebih layak, sebaliknya apabila tingkat pendidikan masyarakatnya lebih rendah, maka belum dapat mencerminkan kesejahteraan berdasarkan perspektif tingkat pendidikan.²²

Natoatmodjo dalam penelitian Prayse menyatakan bahwa tingkat pendidikan dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan tertentu yaitu : pendidikan dasar awal 9 tahun termasuk SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan Pendidikan lanjutan, termasuk minimal 3 tahun pendidikan menengah, termasuk SMA/ sederajat dan pendidikan tinggi termasuk diploma, sarjana, magister, doktor atau spesialis yang diselenggarakan oleh Universitas.²³

Penelitian ini, pendidikan ditentukan dari rata-rata lama sekolah. Indikator rata-rata lama sekolah dimanfaatkan untuk menjamin kualitas penduduk berdasarkan tingkat pendidikan formal. Semakin tinggi tingkat pendidikan

²⁰ Kokila P.Doshi, *Inequality and Economic Growth* (Canada : University of San Diego, 2000)

²¹ Deden, "Pengaruh Pendapatan, Pendidikan dan Konsumsi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur", *Jurnal Edueco*, 1 no.1 (Juni, 2017).

²² A. Junaedi Karso, *Implementasi Kebijakan Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Sebagai Kepala Pemerintahan Di Pelabuhan Guna Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Secara Profesional Dan Akuntabel Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Lingkungan Kepelabuhanan* (Cirebon : Isnaniah, 2021), 184.

²³ Momuat Praysie, dkk., "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi pada Masyarakat di Kelurahan Malalayang I Timur Kota Manado)." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya dan Hukum)* 5, no 2 (2022) : 701-710, 703.

seseorang, maka semakin baik kemampuan pengetahuan dan kecakapan yang akan meningkatkan produktivitas seseorang lebih baik.

Tabel 1.5
Rata – Rata Lama Sekolah di Kabupaten Tasikmalaya
Menurut Usia 15 Tahun Keatas
Tahun 2018-2022

Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
2018	7,13
2019	7,17
2020	7,35
2021	7,48
2022	7,73

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya, 2018-2022.

Tabel 1.5 menunjukkan bahwa, tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya menurut Badan Pusat Statistik mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun 2018 hingga 2022. Artinya bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tasikmalaya hanya mampu mengenyam pendidikan sampai kelas 2 SMP/ sederajat. Hal ini jenjang pendidikan yang mereka tempuh masih dalam kategori rendah meskipun program pendidikan 9 tahun sudah diterapkan akan tetapi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat yang akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Rendahnya pendidikan juga disebabkan karena tidak adanya kesadaran untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi setidaknya menempuh pendidikan SMA.

Penelitian dengan judul “Pengaruh Pendidikan dan Pendapatan Keluarga Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Desa Sidolaju Ngawi” yang diteliti oleh Sudarmiani,dkk. menyebukan bahwa pendidikan secara signifikan mempengaruhi kesejahteraan keluarga.²⁴ Akan tetapi bertolak belakang dengan penelitian dengan judul “Analisis Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pendapatan Terhadap

²⁴ Sudiarmini,dkk., "Pengaruh Pendidikan Dan Pendapatan Keluarga Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Desa Sidolaju Ngawi." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 8 (2022): 2195-2200.

Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Labuhanbatu” yang diteliti oleh Siregar dan Ritonga yang menyebutkan bahwa secara parsial tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan sosial.²⁵

Berdasarkan uraian masalah dan ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk dijadikan dasar dalam melaksanakan penelitian lebih lanjut yang berjudul: **“Pengaruh Bantuan Sosial, Pendapatan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa masalah penelitian terkait dengan “Pengaruh Bantuan Sosial, Pendapatan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022” dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian berikut:

1. Apakah ada pengaruh bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022?
2. Apakah ada pengaruh pendapatan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022?
3. Apakah ada pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022?
4. Apakah ada pengaruh bantuan sosial, pendapatan dan tingkat pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah di rumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

²⁵ Nurlita Aisyah Siregar dan Zuriani Ritonga. "Analisis Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Labuhanbatu." *INFORMATIKA* 6, no. 1 (2018): 1-10.

1. Untuk menganalisis pengaruh bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022.
2. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022.
3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022.
4. Untuk menganalisis pengaruh bantuan sosial, pendapatan dan tingkat pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, baik secara akademis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara akademis

Hasil peneliti ini mampu memberikan sumber informasi dan menambah wawasan keilmuan tentang bantuan sosial, pendapatan, tingkat pendidikan yang kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat.

2. Secara praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menjadi sarana bagi peneliti untuk menambah dan meningkatkan wawasan pengetahuan, serta memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan bantuan sosial, pendapatan, tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

- b. Bagi Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi masyarakat yang berada di Kabupaten Tasikmalaya serta memberikan perhatian lebih dalam tentang bantuan sosial, pendapatan, tingkat pendidikan yang kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya.

c. Bagi Lembaga Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan pertimbangan sebagai solusi atas permasalahan penelitian yang berhubungan dengan bantuan sosial, pendapatan dan tingkat pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

d. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan atau data awal dalam penelitian selanjutnya, sehingga hasilnya dapat di generalisiskan kedalam subjek yang lebih luas.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir dibutuhkan untuk memperjelas skema alur penelitian, agar memudahkan dalam fokus penelitian yang melatarbelakangi dari permasalahan tersebut. Sugiyono menjelaskan bahwa kerangka berfikir adalah model atau konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal penting.²⁶ Untuk menjelaskan penelitian ini digunakan beberapa teori yang terkait langsung dengan masing-masing variabel, yaitu:

1. Pengaruh Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Suharto menyatakan bahwa dalam pembangunan kesejahteraan sosial dilakukan pemerintah sebagai usaha yang terencana dan melembaga meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dalam pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Kesejahteraan ini bukanlah semata-mata menunjuk pada aspek fisik dan ekonomi saja, akan tetapi juga dipertegas bahwasannya kegiatan itu difokuskan untuk mensejahterakan masyarakat banyak, yang lebih tepatnya adalah masyarakat yang kurang beruntung.²⁷

Sarpono menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang dimaksudkan untuk meringankan anggota masyarakat yang tidak mampu dan terlantar agar dapat memenuhi kebutuhan dasar

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung : Alfabeta, 2018), 60.

²⁷ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik* (Bandung : Alfabeta, 2012), 3.

hidupnya sehingga dapat mempertahankan bahkan dapat mengembangkan dirinya sebagai manusia.²⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Gumanti dan Yunita menyatakan bahwa masyarakat akan terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari kebijakan pemerintah terkait pemberian bantuan sosial seperti ketimpangan dilingkungan sekitar dan membantu masyarakat yang kurang beruntung dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.²⁹

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa bantuan sosial memiliki hubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Sehingga jika seseorang telah mendapatkan bantuan sosial maka segala kebutuhan akan terpenuhi khususnya pada masyarakat yang rentan guna untuk melindungi dari permasalahan sosial. Dengan demikian pendapatan memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Pengaruh Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Basri menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan masyarakat adalah kondisi di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasar, baik itu kebutuhan pangan, sandang, papan maupun kesempatan kerja untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidup sehingga status sosialnya menghasilkan derajat yang sama dengan warga lainnya.³⁰

Sukirno menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara atau daerah pada suatu periode tertentu yang biasanya dihitung satu tahun. Pendapatan per kapita merupakan salah satu penentu kesejahteraan masyarakat yang sangat penting. Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu negara atau daerah maka tinagkat kesejahteraan masyarakatnya akan semakin tinggi, begitupula dengan sebaliknya apabila pendapatan per kapita suatu negara atau daerah semakin rendah maka tingkat

²⁸ Sarpono, *Bantuan Sosial Tunai Kementrian Sosial Bagi Keluarga Terdampak Covid-19* (Jakarta : PUSLITBANGKESOS KEMENTRIAN SOSIAL RI, 2020), 20.

²⁹ Andi Gumanti dan Ade Yunita M. "Dampak Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat pada Masa Pandemi di Kota Bandung". *Bandung Conference: Economics Studies* 2, no 2 (2022): 381-399, 383.

³⁰ Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta : Gema Insan Press,2000), 24.

kesejahteraan masyarakatnya akan semakin rendah.³¹ Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Khaldun bahwa setiap negara akan mendapat perbaikan kondisi ekonominya dengan menciptakan keseimbangan antara permintaan agregat dan penawaran agregat. Menurut Ibnu Khaldun pendapatan dan pengeluaran di suatu kota atau negeri satu sama lain saling menuju keseimbangan. Apabila pendapatan kota itu besar, maka pengeluarannya yang besar dan demikian pula sebaliknya. Kemudian, apabila kedua-duanya (pendapatan dan pengeluaran) besar, maka penduduknya sungguh sangat menikmati situasi ini dan kota itu pun menjadi tumbuh berkembang.³²

Penelitian Bleys dan Whitby dalam Arimawan dan Suwendra menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki kenaikan pendapatan, maka akan lebih banyak kebutuhan rumah tangga yang ia penuhi dibanding dengan pendapatan rendah. Pada dasarnya setiap orang yang bekerja tidak lain adalah untuk memperoleh pendapatan yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap jenis pekerjaan akan menghasilkan jumlah pendapatan yang berbeda-beda sehingga besaran penerimaan jumlah pendapatan setiap rumah tangga akan sangat bergantung pada jenis kegiatan yang dilakukannya.³³

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa pendapatan memiliki hubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Sehingga jika seseorang memiliki penghasilan yang tinggi maka segala kebutuhan akan terpenuhi, begitupun sebaliknya. Dengan demikian pendapatan memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

3. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Basri menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan masyarakat adalah kondisi di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasar, baik itu kebutuhan pangan, sandang, papan maupun kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas

³¹ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi* (Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada, 2004), 423.

³² Ibnu Khaldun, *Al-Muqaddimah* (Beirut : Dar- al-Fikr, 1988), 274.

³³ I Nyoman Dedi Arimawan dan I Wayan Suwendra “ Pengaruh Pendapatan dan Pola Konsumsi Terhadap Kesejahteraan Keluarga Nelayan di Desa Bunutan Kecamatan Abang”. *Jurnal Ekuitas : Pendidikan Ekonomi* 10, no 1 (2022) : 153 – 160, 155.

hidup sehingga status sosialnya menghasilkan derajat yang sama dengan warga lainnya.³⁴

Sukirno menyatakan bahwa pendidikan merupakan suatu investasi yang sangat berguna untuk pembangunan ekonomi. Di satu pihak untuk memperoleh pendidikan diperlukan waktu dan uang. Pada masa selanjutnya setelah pendidikan diperoleh, masyarakat dan individu akan memperoleh manfaat. Seseorang yang memperoleh pendidikan tinggi cenderung memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tidak berpendidikan.³⁵ Sedangkan menurut pendapat Ibnu Khaldun pendidikan merupakan suatu penerangan ilmu pengetahuan dan keterampilan serta berbagai aspeknya pada karya nyata untuk memperoleh rizki menuju kepada masyarakat lebih maju sesuai dengan kecenderungan individu.³⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Ela Nur Aini, dkk menyatakan bahwa tingkat pendidikan sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, karena dengan adanya pendidikan akan melahirkan keturunan yang tidak hanya sebagai *agent of change* tetapi memiliki moral yang baik. Pendidikan juga merupakan salah satu sarana sosial untuk menjamin kelangsungan hidupnya dimasa yang akan datang.³⁷

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan dengan kesejahteraan masyarakat, karena jika seseorang telah memiliki pendidikan yang lebih tinggi maka cenderung akan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi sesuai dengan kualitas dan kemampuan dirinya untuk memenuhi kehidupannya, namun sebaliknya apabila seseorang memiliki pendidikan yang rendah maka belum tentu mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dan belum tentu hidupnya dapat terpenuhi. Dengan demikian tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

³⁴ Ikhwani Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, 24.

³⁵ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi* (Jakarta: GrafindoPersada, 2006), 153.

³⁶ Fathiya Hasan Sulaiman, *Ibnu Khaldun tentang Ilmu dan Pendidikan* (Bandung : CV. Diponegoro, 2002),31.

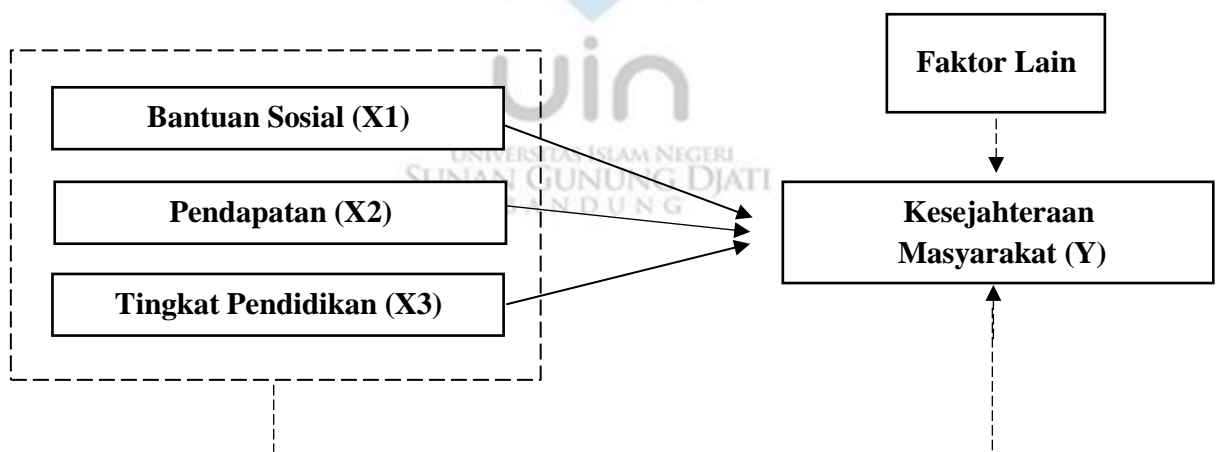
³⁷Ela Nur Aini, dkk., "Pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kesatrian Kota Malang." *Technomedia Journal* 3, no. 1 Agustus (2018): 58-72, 68.

4. Pengaruh Bantuan Sosial, Pendapatan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hubungan antara variabel bantuan sosial (X1), pendapatan (X2) dan tingkat pendidikan (X3) diduga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Y). Hal ini dapat diartikan bahwa apabila dalam mengimplementasikan penyaluran bantuan sosial dijalankan secara tepat dan optimal, maka akan berpengaruh terhadap taraf hidup masyarakat yang nantinya akan hidup sejahtera, begitupun sebaliknya. Pendapatan dan tingkat pendidikan juga menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam menentukan kesejahteraan masyarakat. Apabila setiap orang memiliki pendapatan yang lebih tinggi karena pendidikannya maka akan menunjang kesejahteraan yang lebih baik.

Dengan demikian, secara ilustratif, hubungan tersebut dapat digambarkan ke dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.1
Alur Kerangka Pemikiran



Keterangan :

- ▶ : Hubungan secara parsial
- - - - -▶ : Hubungan secara simultan

Sumber: Dibuat dan dikembangkan oleh peneliti.

Gambar 1.1 tersebut menjelaskan bahwa masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel bantuan sosial (X1) dapat berpengaruh secara parsial terhadap variabel kesejahteraan masyarakat (Y), variabel pendapatan (X2) dapat berpengaruh secara parsial terhadap variabel kesejahteraan masyarakat (Y) dan variabel tingkat pendidikan (X3) dapat berpengaruh secara parsial terhadap variabel kesejahteraan masyarakat (Y). Kemudian secara simultan variabel bantuan sosial (X1), pendapatan (X2) dan tingkat pendidikan (X3) dapat berpengaruh terhadap variabel kesejahteraan masyarakat (Y).

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah tersebut bisa berupa pernyataan tentang hubungan dua variabel atau lebih, perbandingan (komparasi) atau variabel mandiri (deskripsi).³⁸ Dengan demikian dikatakan sementara, karena jawaban penelitian tersebut baru berdasarkan pada teoritis belum berdasarkan pada data-data empiris dari pengumpulan data untuk diuji kebenarannya.

Sesuai dengan kerangka pemikiran di atas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. H_{a1} : Bantuan sosial berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022.
 H_{o1} : Bantuan sosial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2022.
2. H_{a2} : Pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022.
 H_{o2} : Pendapatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022.

³⁸ Sugiyono. *Statistika untuk Penelitian* (Bandung : Alfabeta, 2019), 84.

3. H_{a3} : Tingkat pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022.

H_{o3} : Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022.

4. H_{a4} : Bantuan sosial, pendapatan dan tingkat pendidikan berpengaruh secara simultan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022.

H_{o4} : Bantuan sosial, pendapatan dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara simultan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti telah menelusuri beberapa penelitian sebelumnya dari berbagai *literature review* yang berkaitan dengan judul yang akan di teliti. Berikut terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu:

Tabel 1.6
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Nurintan Asyiah Siregar dan Zuriyani Ritonga (Jurnal, 2018).	Analisis Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Labuhanbatu	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan sosial di Kabupaten Labuhanbatu. Sedangkan tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan sosial di Kabupaten Labuhanbatu. Sedangkan secara simultan (bersama - sama) tingkat

			pendidikan dan tingkat pendapatan berpengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial di Kabupaten Labuhanbatu. ³⁹
2.	Firda Wiku, Tri Oldy Rotinsulu dan Een N Walewangko (Jurnal, 2020).	Analisis Pengaruh Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Minahasa Tenggara	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan peningkatan bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada rumah tangga secara parsial memberi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga di Kabupaten Minahasa Tenggara. Sedangkan secara simultan peningkatan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada rumah tangga secara bersama-sama memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga di Kabupaten Minahasa Tenggara. ⁴⁰
3.	Muhammad Abdianor	Analisis Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Tanah Laut	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian bantuan sosial

³⁹ Nurintan Aisyah Siregar, and Zuriani Ritonga. "Analisis Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Labuhanbatu".

⁴⁰ Firda Wiku dkk., "Analisis Pengaruh Bantuan Sosial (PKH dan KUBE) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Minahasa Tenggara." *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 21, no. 1 (2021): 1-16.

	Nasrullah dan Rahma Annisa (Jurnal, 2021).	Pada Masa Pandemi Covid-19	tidak memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi Covid-19. Di mana bantuan sosial hanya berpengaruh sekitar 0,04% terhadap kesejahteraan masyarakat sedangkan sisanya 99,96% disebabkan oleh faktor-faktor lainnya. ⁴¹
4.	Mira Santika dan Zulkifli (Jurnal, 2021).	Pengaruh Zakat, Bantuan Sosial dan Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Diukur Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Gayo Lues)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Zakat, Bantuan Sosial dan Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Gayo Lues Dalam Perspektif Islam. ⁴²
5.	Amin Hafidz Haqiqi dan Waspodo Tjipto Subroto (Jurnal, 2021).	Pengaruh Pendapatan dan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Kesejahteraan Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Bedingin, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan dan konsumsi rumah tangga berpengaruh signifikan dan positif terhadap kesejahteraan keluarga. Sedangkan secara simultan pendapatan dan konsumsi rumah tangga secara bersama-sama mempengaruhi terhadap kesejahteraan Penerima Bantuan Sosial Program

⁴¹ Muhammad Abdianor Nasrullah dan Rahma Annisa. "Analisis Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Tanah Laut Pada Masa Pandemi Covid-19.

⁴² Mira Santika dan Zulkifli Zulkifli. "Pengaruh Zakat, Bantuan Sosial dan Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Diukur Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Gayo Lues)".

			Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Bedingin, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan sebesar 85.8% sedangkan sisanya 14.2% dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang tidak diteliti. ⁴³
6.	Khotim Fadhli dan Dyah Ayu Noer Fahimah (Jurnal, 2021).	Pengaruh Pendapatan, Pendidikan dan Gaya Hidup Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Covid-19	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum adanya pengaruh yang signifikan pada pendapatan yang berasal dari bantuan sosial terhadap kesejahteraan keluarga penerima manfaat (KPM) pada masa pandemi covid-19, karena jumlah bantuan yang terlalu kecil dan hanya cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pendidikan juga melum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan keluarga penerima manfaat (KPM) pada masa pandemi covid-19. Sementara, gaya hidup memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan keluarga penerima manfaat (KPM) pada masa pandemi covid-19. ⁴⁴

⁴³ Amin Hafidz Haqiqi dan Wasmodo Tjipto Subroto, "Pengaruh Pendapatan Dan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Bedingin Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan".

⁴⁴ Khotim Fadhli dan Dyah Ayu Noer Fahimah. "Pengaruh Pendapatan, Pendidikan dan Gaya Hidup Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Covid-19."

7.	Sudarmiani, Nurhadji, Sri Maryati, Fatihatull M dan Novi N.L (Jurnal, 2022).	Pengaruh Pendidikan Dan Pendapatan Keluarga Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Desa Sidolaju Ngawi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pendidikan dan pendapatan berpengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan keluarga didesa sidolaju. Sedangkan secara simultan pendidikan dan pendapatan keluarga secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesejahteraan Desa Sidolaju Ngawi. ⁴⁵
8.	Muharir (Jurnal, 2022).	Pengaruh Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Di Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Kumbang)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagian berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat penerima manfaat di Desa Tirta Makmur, Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin. ⁴⁶
9.	Andi Gumanti dan Ade Yunita, (Jurnal, 2022).	Dampak Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat pada Masa Pandemi di Kota Bandung	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan sosial yang diberikan pemerintah memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi masyarakat. ⁴⁷

⁴⁵ Sudiarmini,dkk., "Pengaruh Pendidikan Dan Pendapatan Keluarga Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Desa Sidolaju Ngawi.

⁴⁶ Muharir. "Pengaruh Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Di Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Kumbang." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2022): 145-174.

⁴⁷ Andi Gumanti dan Ade Yunita M. "Dampak Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat pada Masa Pandemi di Kota Bandung".

10.	Ni Luh Ayu Utami Ningsih dan Wayan Suwendra (Jurnal, 2022).	Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Anggota Keluarga Terhadap Kesejahteraan Kelurga di Kelurahan Karang Asem	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan dan jumlah anggota keluarga berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kesejahteraan keluarga. Sedangkan secara simultan pendapatan dan jumlah anggota keluarga berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan keluarga. ⁴⁸
-----	---	---	---

Setelah peneliti mempelajari dan mendalami dari sepuluh penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian tersebut memiliki hasil yang tidak konsisten, meskipun sama-sama membahas tentang kesejahteraan, namun memiliki fokus yang berbeda pada variabel *independen*. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti ingin mengkaji pada variabel bantuan sosial, pendapatan dan tingkat pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Perbedaan lainnya terletak pada aspek variabel yang digunakan, penelitian sebelumnya didominasi menggunakan 2 jenis *variabel independen* (X) dan 1 *variabel dependen* (Y) sedangkan peneliti menggunakan 3 jenis *variabel independen* (X) yaitu bantuan sosial, pendapatan dan tingkat pendidikan dan 1 *variabel dependen* (Y) yaitu kesejahteraan masyarakat, kemudian perbedaan lainnya yang mendasar adalah pada lokasi dan waktu penelitian.

⁴⁸ Ni Luh Ayu Utaminingsih dan I Wayan Suwendra. "Pengaruh Pendapatan Dan Jumlah Anggota Keluarga Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karangasem." *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 256-263.